V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB)

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk Membantu Gubernur dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Entitas berkedudukan di Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) mempunyai tugas dan fungsi Membantu Gubernur dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) berkomitmen dengan visi “Membantu Gubernur dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022.”

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kepada Kementerian negara/Lembaga;
- Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus;
- Meningkatnya perlindungan khusus anakkepentingan;
- Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Pendahuluan

A.2. Pendahuluan

Paket Undang-undang regulasi pengelolaan keuangan beserta turunannya membawa atmosfir baru terhadap tata kelola keuangan pemerintah dengan berbagai penyempurnaan-penyempurnaannya, ini semua untuk memenuhi keinginan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dapat diterima secara umum. Adanya pergeseran-pergeseran terhadap penerapan fungsi-fungsi pengelolaan serta penatausahaan keuangan daerah semula bersifat sentralistik menjadi desentralisasi, yang artinya bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas pelaporan berkewajiban untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, efisiensi dan transparansi dengan melaporkan secara periodik dan berjenjang.

Selain itu laporan keuangan merupakan potret realisasi atas anggaran pendapatan dan belanja pada setiap SKPD pada tahun berkenaan, tercermin dalam tabel perangkaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Namun demikian untuk memudahkan pengungkapan secara naratif atas pergerakan angka tersebut diatas maka dapat dipahami melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Maksud dan Tujuan

A.2.1. Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance).

Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

a). Menyajikan informasi tentang kebijakan keuangan dan pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

b). Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

c). Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d). Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

e). Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

f). Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Dasar Hukum

A.2.2. Dasar Hukum

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance).

Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

1). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;

2). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

5). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

12). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);

14). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9);

15). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);

16). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 3);

17). Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 48) dan Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 68);

18). Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3);

19). Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 51);

20). Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 23);

21). Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 24);

22). Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 47);

23). Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 39);

24). Keputusan Kepala BPKAD Nomor 915/153-SK.PPKD/IX/2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020;

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

SIMRAL terdiri dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dan Aplikasi Teknologi Informasi Silus Barang Daerah (ATISISBADA). SIMRAL dan ATISISBADA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Perencanaan Anggaran, Penatausahaan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan ATISISBADA adalah sistem yang menghasilkan informasi perencanaan, penerimaan dan distribusi, penatausahaan, pemeliharaan aset tetap, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) adalah sebagai berikut:

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB). Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- Akuntansi Belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai signifikan.

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kas tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersembahkan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pituang Jangka Panjang

Pituang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimilki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable), Utang Bunga (Accrued Interest), Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities), Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan dan yang diperjualbelikan, Perubahan Valuta Asing.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pada penjelasan tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Peraturan Gubernur Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dalam penjelasan tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pada Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Daerah. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 December 2020 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 00,00% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan dinas tidak mengelola pendapatan.

Realisasi Belanja Rp19.948.270.434

BELANJA OPERASI

Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 adalah sebesar Rp19.948.270.434 atau 89,42 persen dari anggaran senilai Rp22.308.407.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 December 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 December 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	13.053.000.000	12.546.552.467	96,12
Belanja Barang	8.586.653.600	7.114.617.967	82,86
Belanja Modal	668.753.400	287.100.000	42,93
Belanja Bantuan Hibah	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	***22.308.407.000***	***19.948.270.434***	***89,42***
Pengembalian Belanja		***0***	***0,00***
Belanja Netto	***22.308.407.000***	***19.948.270.434***	***89,42***

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

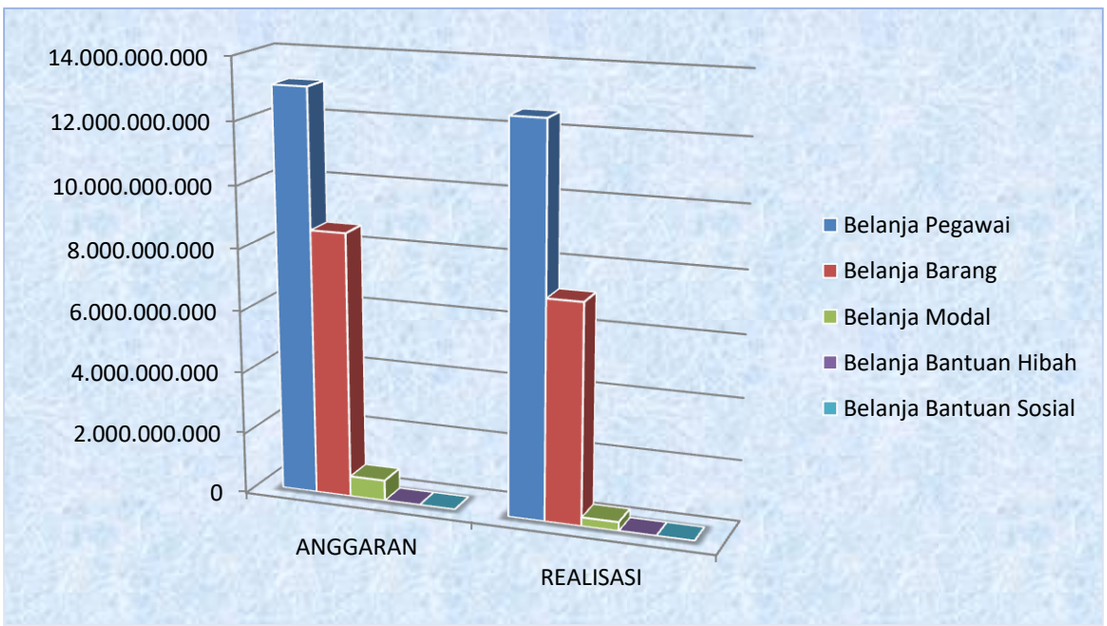

Realisasi Belanja per 31 December 2020 sebesar 89,42 persen jika dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Komposisi Realisasi Belanja per 31 December 2020 diperbandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2019, dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

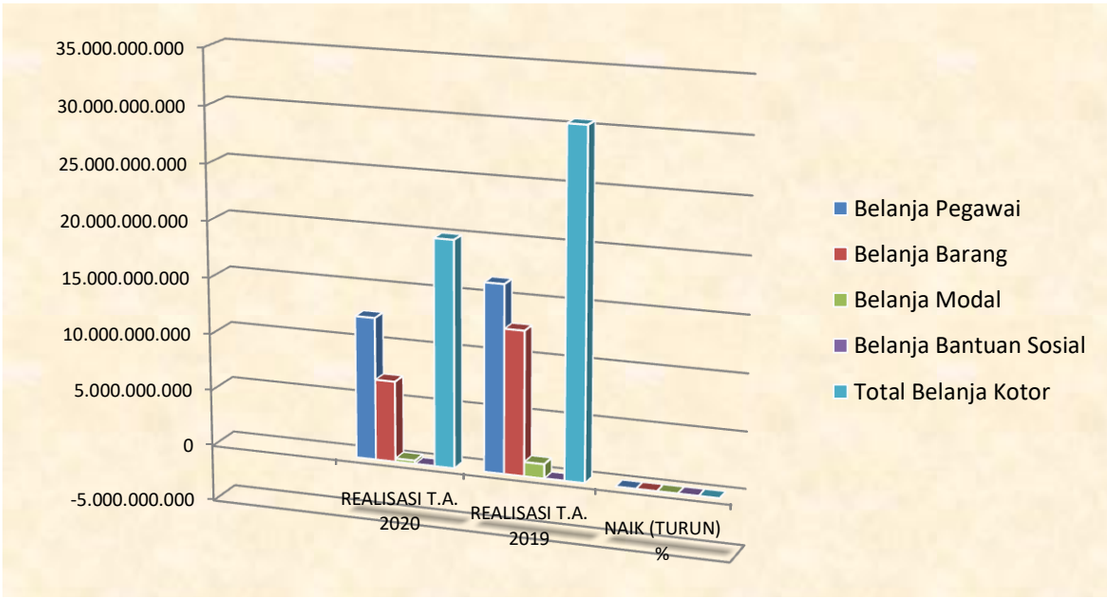

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019, Realisasi Belanja per 31 December 2020 mengalami penurunan sebesar -34,65 dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya regulasi dan peraturan yang membatasi dalam Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 December 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12.546.552.467	16.549.716.441	-24,19
Belanja Barang	7.114.617.967	12.713.865.804	-44,04
Belanja Modal	287.100.000	1.261.326.192	-77,24
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	**19.948.270.434**	**30.524.908.437**	**-34,65**

Belanja Pegawai Rp12.546.552.467

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) pada Tahun Anggaran 2020 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 December 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.546.552.467 dan Rp16.549.716.441 Berdasarkan Tabel, realisasi belanja 31 December 2020 mengalami penurunan sebesar -24,19 persen dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya bencana luar biasa yaitu pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap kinerja dimana sesuai regulasi yang ada maka dilakukan pembagian tugas pegawai ada yang Piket dan WFH (Work From Home) diatur 20% kerja masuk kantor dan 75% kerja dirumah.

2. Pengurangan pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS berdasarkan Beban Kerja dengan berlakunya regulasi hal tersebut point satu maka pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja dibayar hanya 50% dan 75%.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.236.445.600	3.161.608.287	2,37
Belanja Tunjangan Keluarga	274.859.932	270.724.316	1,53
Belanja Tunjangan Jabatan	241.690.000	247.100.000	-2,19
Belanja Tunjangan Umum	110.880.000	109.185.000	1,55
Belanja Tunjangan Beras	151.502.640	152.733.780	-0,81
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.429.944	4.877.661	31,82
Belanja Pembulatan Gaji	45.445	50.043	-9,19
Belanja Iuran BPJS Kesehatan	313.582.123	88.287.236	255,18
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	27.054.173	25.418.593	6,43
Belanja TP Berdasarkan Beban Kerja	8.154.662.610	12.087.881.525	-32,54
Belanja TP Berdasarkan Kondisi Kerja	14.000.000	0	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	15.400.000	29.800.000	-48,32
Belanja Tunj. Tambahan Penghasilan Guru PNS	0	0	0,00
Belanja Uang Honor Tetap	0	372.050.000	-100,00
Belanja Vakasi	0	0	0,00
Belanja Uang Lembur	0	0	0,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***12.546.552.467***	***16.549.716.441***	***-24,19***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***12.546.552.467***	***16.549.716.441***	***-24,19***

Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini merupakan Realisasi Belanja Pegawai per 31 December 2020 mengalami kenaikan sebesar -24,19 persen .

Realisasi Belanja Pegawai per 31 December 2020

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2020	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.312.400.000	3.236.445.600	97,71
Belanja Tunjangan Keluarga	295.100.000	274.859.932	93,14
Belanja Tunjangan Jabatan	251.617.173	241.690.000	96,05
Belanja Tunjangan Umum	120.509.633	110.880.000	92,01
Belanja Tunjangan Beras	169.462.800	151.502.640	89,40
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000	6.429.944	45,93
Belanja Pembulatan Gaji	100.550	45.445	45,20
Belanja Iuran BPJS Kesehatan	391.800.000	313.582.123	80,04
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	31.919.844	27.054.173	84,76
Belanja TP Berdasarkan Beban Kerja	8.274.090.000	8.154.662.610	98,56
Belanja TP Berdasarkan Kondisi Kerja	19.200.000	14.000.000	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	172.800.000	15.400.000	8,91
Belanja Tunj. Tambahan Penghasilan Guru PNS	0	0	0,00
Belanja Uang Honor Tetap	0	0	0,00
Belanja Vakasi	0	0	0,00
Belanja Uang Lembur	0	0	0,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***13.053.000.000***	***12.546.552.467***	***96,12***
Pengembalian Belanja	***0***	***0***	***0,00***
Jumlah Belanja Netto	***13.053.000.000***	***12.546.552.467***	***96,12***

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) pada Tahun Anggaran 2020 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja yang dianggarkan untuk Belanja Pegawai adalah sebesar Rp13.053.000.000 terrealisasi sebesar Rp12.546.552.467 atau sebesar 96,12 persen sehingga belanja pegawai tidak terrealisasi 100 persen, hal ini disebabkan pada saat perubahan anggaran adanya penambahan anggaran namun tidak dapat di realisasikan terbentur dengan regulasi yang ada.

Belanja Barang Rp7.114.617.967

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun Anggaran 31 December 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.114.617.967 dan Rp12.713.865.804.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran Per 31 December 2020 mengalami penurunan -44,04 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh menurunnya belanja barang operasional yang cukup signifikan di samping turunnya biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas sepanjang Tahun Anggaran 2020.

Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	948.427.000	1.205.826.849	-21,35
Belanja Jasa	5.389.577.162	9.691.151.094	-44,39
Belanja Pemeliharaan	312.248.267	358.235.902	-12,84
Belanja Perjalanan Dinas	464.365.538	1.458.651.959	-68,16
Jumlah Belanja Bruto	***7.114.617.967***	***12.721.695.804***	***-44,07***
Pengembalian Belanja	*0*	*7.830.000*	*-100,00*
Jumlah Belanja Netto	***7.114.617.967***	***12.713.865.804***	***-44,04***

Realisasi Belanja Langsung Per Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun Anggaran Per 31 December 2020 mengalami penurunan sebesar -44,04 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh menurunnya belanja barang operasional yang cukup signifikan dikarenakan adanya perubahan regulasi-regulasi di samping turunnya biaya pemeliharaan Tahun Anggaran 2020.

LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN T.A. 2020	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
	Program Tata Kelola Pemerintahan	**2.359.966.000**	**2.193.540.785**	**92,95**
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	36.000.000	32.747.000	90,96
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	250.562.000	232.981.000	92,98
3	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	0	0	0,00
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0	0	0,00
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0	0	0,00
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	22.400.000	14.400.000	64,29
7	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0	0	0,00
8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	5.400.000	5.360.000	99,26
9	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	2.045.604.000	1.908.052.785	93,28
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	**2.508.293.000**	**2.021.703.992**	**80,60**
10	Perencanaan Responsif Gender	379.424.600	284.186.592	74,90
11	Peningkatan kualitas hidup perempuan	998.897.000	821.066.000	82,20
12	Peningkatan kualitas keluarga	1.129.971.400	916.451.400	81,10
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	**1.541.889.000**	**1.391.169.000**	**90,22**
13	Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak	522.069.000	432.419.000	82,83
14	Perlindungan khusus terhadap anak	422.520.000	397.040.000	93,97
15	Perlindungan Hak Perempuan	597.300.000	561.710.000	94,04
	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	**682.397.600**	**478.959.385**	**70,19**
16	Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi kependudukan	0	0	0,00
17	Pembinaan administrasi sebagai data dan informasi pencatatan sipil	0	0	0,00
18	Pembinaan dan peningkatan layanan data dan informasi kependudukan dan catatan sipil	0	0	0,00
19	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)	78.000.000	41.896.400	53,71
20	Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)	77.577.000	37.508.725	48,35
21	Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)	80.000.000	53.964.000	67,46
22	Peningkatan Penyelenggaraan KTP-El dan KIA	125.000.000	92.749.760	74,20
23	Peningkatan Administrasi Catatan Sipil	96.611.614	85.419.000	88,41
24	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	225.208.986	167.421.500	74,34
	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	**1.494.108.000**	**1.029.244.805**	**68,89**
25	Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk	497.325.000	411.178.500	82,68
26	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana	0	0	0,00
27	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga Berencana	0	0	0,00
28	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan (AKIE) Keluarga Berencana (KB)	481.158.000	347.491.305	72,22
29	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	515.625.000	270.575.000	52,48
	Jumlah	**8.586.653.600**	**7.114.617.967**	**82,86**

Kondisi realisasi anggaran maupun kegiatan secara keseluruhan terdampak oleh kondisi bencana luar biasa yaitu pandemi Covid-19 sehingga keseluruhan kegiatan menyesuaikan dengan regulasi yang dibuat baik Pemerintah Pusat maupun sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor : 443/Kep.114-Huk/2020 Tentang Penetapan KLB Covid-19 dan SE Sekda Banten Tentang Pembatasan Kegiatan dan Jumlah Pesertanya lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini.

No.	Uraian	Keterangan dan Alasannya
	Program Tata Kelola Pemerintahan	
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Adanya pembatasan perjalanan dinas dalam daerah sehingga tidak terealisasi keseluruhan sesuai rencana kegiatan dan Efisiensi dalam belanja penggandaan
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Adanya pembatasan perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah dan Efisiensi narasumber dan tenaga ahli
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Narsum untuk kegiatan yg pesertanya dari opd tidak boleh d bayarkan
4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Adanya Efisiensi anggaran
5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Sesuai rencana anggaran kegiatan, kecuali belanja modal Peralatan dan mesin, pengadaan personal komputer, dan pengadaan alat studio di karenakan pengadaan melalui e purchasing. Sampai dengan bulan november 2020 produk tidak tayang maka pembelian dibatalkan. Mengindari Deviasi
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	
6	Perencanaan Responsif Gender	Terbatasnya Kegiatan dan Jumlah Peserta, maka dari itu banyak kode rekening yang tidak dapat terealisasi secara maksimal serta waktu pelaksanaan yang sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan (akhir tahun).
7	Peningkatan kualitas hidup perempuan	Pengurangan dari jumlah target capaian pada perencanaan kegiatan menjadi salah satu dampak tidak maksimal nya penyerapan tahun anggaarann 2020 diantara nya dari jumlah peserta kegiatan tidak semua yg direalisasikan, merujuk pada peraturan gubernur dan surat edaran sekda terkait pembatasan pelaksanaan kegiatan yg merujuk pada protokol kesehatan. Terbatasnya Kegiatan dan Jumlah Pesertanya, maka dari itu banyak kode rekening yang tidak dapat terealisasi secara maksimal serta waktu pelaksanaan yang sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan (akhir tahun).
8	Peningkatan kualitas keluarga	Sebagai dampak dari terjadinya Pandemi Covid-19 maka kegiatan yang tadinya tatap muka dengan jumlah peserta yang banyak berubah menjadi kegiatan daring sehingga banyaknya pengembalian anggaran seperti Uang Saku Peserta, Makanan dan Minuman, serta Efisiensi Honorarium Narasumber.
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	
10	Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak	Beberapa anggaran efisensi seperti makan minum, uang saku, honor belanja sewa tidak diserap karena pembatasan sesuai dengan regulasi yang ada.
11	Perlindungan khusus terhadap anak	Kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan sempurna sesuai dengan perencanaan. dan efisiensi kontrak karena dibatasi regulasi pandemi.

12	Perlindungan Hak Perempuan	Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Uang Saku Peserta, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Internet, Belanja Cetak dan Belanja Promosi dan Publikasi. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor : 800/1518-BKD/2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten, bahwa penyelenggaraan kegiatan memperhatikan protokol kesehatan dan dihadiri dengan peserta tidak lebih dari 10 orang.
	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	
13	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)	Tidak Maksimalnya Penyerapan Anggaran dikarnakan kegiatan yg awalnya akan dilaksanakan secara tatapmuka di ganti secara Daring melalui Zoom Cloud Meeting Karena terkait Virus Covid-19 Dengan Dasar Surat Gubernur Banten No 443/kep.14-Huk/2020 Penetapan Kejadian Luar Biasa Korona diwiayah Provinsi Banten Menghimbau agar tidak melakukan kegiatan/Aktifitas Bekerja dirumah WFH dan tidak terserapnya makan minum kegiatan, uang saku peserta serta tidak adanya undangan dari Kemendagri terkait perjalanan dinas.
14	Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)	Tidak Maksimalnya Penyerapan Anggaran dikarnakan kegiatan yg awalnya akan dilaksanakan secara tatapmuka di ganti secara Daring melalui Zoom Cloud Meeting Karena terkait Virus Covid-19 Dengan Dasar Surat Gubernur Banten No 443/kep.14-Huk/2020 Penetapan Kejadian Luar Biasa Korona diwiayah Provinsi Banten Menghimbau agar tidak melakukan kegiatan/Aktifitas Bekerja dirumah WFH
15	Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)	Efisiensi mamin dan uang saku peserta
16	Peningkatan Penyelenggaraan KTP-El dan KIA	Tidak Maksimalnya Penyerapan Anggaran dikarnakan kegiatan yg awalnya akan dilaksanakan secara tatap muka di ganti secara Daring melalui Zoom Cloud Meeting Karena terkait Virus Covid-19 dengan dasar Surat Gubernur Banten No 443/kep.14-Huk/2020 Penetapan Kejadian Luar Biasa Korona diwiayah Provinsi Banten Menghimbau agar tidak melakukan kegiatan/Aktifitas Bekerja dirumah WFH dan tidak terserapnya makan minum kegiatan, uang saku peserta dan efesiensi perjalanan dinas.
17	Peningkatan Administrasi Catatan Sipil	Tidak Maksimalnya Penyerapan Anggaran dikarnakan kegiatan yg awalnya akan dilaksanakan secara tatapmuka di ganti secara Daring melalui Zoom Cloud Meeting Karena terkait Virus Covid-19 Dengan Dasar urat Gubernur Banten No 443/kep.14-Huk/2020 Penetapan Kejadian Luar Biasa Korona diwiayah Provinsi Banten Menghimbau agar tidak melakukan kegiatan/Aktifitas Bekerja dirumah WFH dan adanya penurunan pangkat pada Narasumber Rapat Kegiatan
18	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Pembatalan Rakornas dan efisiensi mamin serta uang saku peserta

	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	
19	Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk	Capaian realisasi keuangan kegiatan Pemetaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk mencapai 82.68 %, adapun capaian realisasi Fisik mencapai 100 %, hal ini disebab karena adanya Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid 19, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 443/Kep. 114-Huk/2020 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid 19) di wilayah Provinsi Banten. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah terbitnya Surat Keputusan ini hanya dapat dihadiri dengan 10 peserta, sehingga banyak menyisakan silpa (sisa anggaran) yaitu Uang Saku Peserta dan Makan Minum Rapat.
20	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan (AKIE) Keluarga Berencana (KB)	Pelayanan KB di Kota cilegon tidak bersedia karena kondisi wabah Covid19 sehingga tidak dapat dilaksanakan, efisiensi dua narasumber dari esselon 3 ke esselon 4, dan Peserta di semua kegiatan tidak sesuai target karena mematuhi Surat Keputusan Gubernur Banten terkait wabah Covid19.
21	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Capaian realisasi Fisik kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mencapai 100 % namun realisasi keuangan sebesar 52,48 %. Hal ini disebabkan karena adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) Pandemi Covid 19, dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 443/Kep. 114-Huk/2020 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid 19) di wilayah Provinsi Banten. Sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan setelah terbitnya Surat Keputusan ini hanya dapat dihadiri dengan maksimal jumlah peserta hanya 10 orang, dan sebagian lagi kegiatan dilakukan dengan cara Webinar sehingga banyak menyisakan silpa (sisa anggaran) yaitu Uang Saku Peserta dan Makan Minum Kegiatan.

Belanja Hibah Rp0

B.4 *Belanja Hibah*

Realisasi Belanja Hibah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Hibah TA 2020 mengalami penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Hibah TA 2019. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima hibah dalam rangka pemberdayaan untuk mendukung rencana kerja strategis.

Perbandingan Belanja Hibah TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Hibah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 mengalami penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima bantuan sosial dalam rangka pemberdayaan sosial untuk mendukung rencana kerja strategis.

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah Rp0

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal 31 December 2020 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini disebabkan penambahan tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp283.500.000

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp283.500.000 dan Rp1.261.326.192 atau sebesar -77,52 persen.

Sesuai rencana anggaran kegiatan, kecuali belanja modal Peralatan dan mesin, pengadaan personal komputer, dan pengadaan alat studio di karenakan pengadaan melalui e purchasing. Sampai dengan bulan november 2020 produk tidak tayang maka pembelian dibatalkan. Mengindari Deviasi

Realisasi Belanja Modal per 31 December 2020 mengalami Penurunan sebesar -77,52 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti regulasi yang membatasi dalam belanja modal karena kondisi pandemi luar biasa Covid-19 yang merupakan bencana nasional dan internasional sehingga segi prioritas di anggarkan ke penanganan bencana pandemi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 December 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	261.000.000	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	25.875.000	-100,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	0	4.310.640	-100,00
Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0	5.400.000	-100,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0	518.279.380	-100,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.500.000	24.893.000	-9,61
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Server Komputer	0	341.348.080	-100,00
Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	0	201.746.010	-100,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0	69.061.400	-100,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0	8.161.532	-100,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0	1.094.300	-100,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Kerja Pejabat	0	5.496.100	-100,00
Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0	12.876.100	-100,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video Fisual	0	42.784.650	-100,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telepon	0	0	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Sandi	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***283.500.000***	***1.261.326.192***	***-77,52***
Pengembalian Belanja	0	0	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***283.500.000***	***1.261.326.192***	***-77,52***

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.8 *Belanja Modal Gedung dan Bangunan*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini disebabkan oleh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun) %
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini disebabkan oleh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***0***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***0***	***0***	***0,00***

Belanja Modal Lainnya Rp0

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.600.000 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami Kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini disebabkan oleh pengadaan Buku bahan untuk perpustakaan untuk peningkatan wawasan dan minat baca..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.600.000	0	0,00
Software	0	0	0,00
Program Komputer	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	***3.600.000***	***0***	***0,00***
Pengembalian Belanja	*0*	*0*	*0,00*
Jumlah Belanja Netto	***3.600.000***	***0***	***0,00***

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.280.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 sebesar Rp0 dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah dari Kas Bank Banten sesuai dengan STS Nomor 017/STS/DP3AKKB/2020 tertanggal 30 Desember 2020.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.280.000 sudah dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai STS Nomor 0001/DP3AKKB/2020 tanggal 15 Januari 2020 sehingga pada neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:"

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Bend Peng DP3AKKB Prov Banten 0801000672	Rp -	Rp -
2	Bend Peng DP3AKKB Prov BJB 0100000120201	Rp -	Rp -
3	Uang Tunai	Rp -	Rp 2.280.000
Jumlah		Rp -	Rp 2.280.000,00

Kas di Bendahara Penerima Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 December 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Daerah Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Jenis	Tahun 2020	Tahun 2019
1	-	Rp -	Rp -
2	Uang Tunai	Rp -	Rp -
Jumlah		**Rp -**	**Rp -**

Kas di BLUD Rp0

C.3 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per tanggal 31 December 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas di BLUD merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas di BLUD pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di BLUD

Jenis	Tahun 2020	Tahun 2019
	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya Rp0

C.4 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per tanggal 31 December 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Rincian Kas Lainnya disajikan sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	-	-
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Setara Kas Rp64.646.000

C.5 Setara Kas

Saldo Setara Kas per tanggal 31 December 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. pada tanggal pelaporan. Rincian Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar (TP/TGR)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1		-	-
2		-	-
Jumlah		**-**	**-**

Bagian Lancar TPA Rp64.646.000

C.6 Investasi Jangka Pendek

Saldo Investasi Jangka Pendek per tanggal 31 December 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Investasi Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1		-	-
2		-	-
Jumlah		**-**	**-**

Piutang Pendapatan Rp0

C.7 Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 December 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Piutang Pendapatan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Piutang Pendapatan

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
Total				**-**

Piutang Lainnya Rp0

C.8 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 December 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Piutang Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Piutang Lainnya

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
Total				**-**

Penyisihan Piutang Rp0

C.9 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 December 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Penyisihan Piutang pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
Total				**-**

Beban Dibayar di Muka Rp0

C.10 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 December 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
		-	0,00%	-
Total				-

Persediaan Rp64.646.000

C.11 Persediaan

Nilai Persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp11.754.900 dan Rp64.646.000 atau sebesar 0,00 persen. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp11.754.900 dan Rp64.646.000 atau sebesar 0,00 persen. tidak ada mutasi masuk reklasifikasi dari Akun sebesar Rp0 ."

Rincian Perbandingan Persediaan

Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun) %
Alat Tulis Kantor	4.979.900	32.684.500	(85)
Alat Listrik dan Elektronik	-	140.000	(100)
Perangko, Materai dan Benda Pos	-	-	-
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	3.705.000	(100)
Suku Cadang Peraltan Komputer/Printer/Jaringan	-	-	-
Suku Cadang Alat Studio	-	-	-
Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata	-	-	-
Perlengkapan Peserta/Panitia	-	-	-
Peralatan Dapur	-	-	-
Persediaan Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Kantor	-	-	-
Bahan Percontohan/Peraga/Praktek	-	-	-
Barang Cetak	6.775.000	28.116.500	(76)
Pakaian PDH	-	-	-
Pakaian Dinas Batik	-	-	-
Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-
Pakaian Batik Tradisional	-	-	-
Pakaian Bercorak Kesenian	-	-	-
Hadiah Prestasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Desa	-	-	-
Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Masyarakat	-	-	-
Barang Non Kapitalisasi Konstruksi/Bangunan	-	-	-
Barang Non Kapitalis	-	-	-
Jumlah	11.754.900	64.646.000	(82)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp0

C.12 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 December 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. .

Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 December 2020 adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya Rp0

C.13 Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya

Saldo Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya per 31 December 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya per 31 December 2020 adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Dalam Obligasi Rp0

C.14 Investasi Dalam Obligasi

Saldo Investasi Dalam Obligasi per 31 December 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Dalam Obligasi adalah sebagai berikut:

Investasi Dalam Obligasi

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi dalam Proyek Pembangunan Rp0

C.15 Investasi dalam Proyek Pembangunan

Saldo Investasi dalam Proyek Pembangunan per 31 December 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Saldo Investasi dalam Proyek Pembangunan adalah sebagai berikut:

Investasi Dalam Obligasi

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Dana Bergulir Rp0

C.16 Dana Bergulir

Saldo Dana Bergulir per 31 December 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

Dana Bergulir

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Deposito Jangka Panjang Rp0

C.17 Deposito Jangka Panjang

Saldo Deposito Jangka Panjang per 31 December 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Deposito Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Deposito Jangka Panjang

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Non Permanen Lainnya Rp0

C.18 Investasi Non Permanen Lainnya

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 December 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Non Permanen Lainnya adalah sebagai berikut:

Investasi Non Permanen Lainnya

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Jangka Panjang Permanen Rp0

C.19 Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 December 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Permanen

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp0

C.20 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 December 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Investasi Permanen Lainnya Rp0

C.21 Investasi Permanen Lainnya

Saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 December 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Saldo Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut:

Investasi Permanen Lainnya

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1			-
2			-
3			-
Jumlah			

Tanah Rp0

C.22 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 sebesar Rp0. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2020. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang.

Saldo per 31 December 2019	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Saldo per 31 December 2020	Rp	-

Rincian Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah per 31 December 2020

No.	KIB	Luas	Nilai	
1	-	-	Rp	-
2			Rp	-
Jumlah			Rp	-

Peralatan dan Mesin Rp8.165.963.158

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 adalah Rp7.934.402.228 dan Rp8.165.963.158.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 December 2019	**Rp**	**7.934.402.228,42**
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	287.100.000,00
- Mutasi Masuk dari OPD Lain	Rp	-
- Hibah	Rp	-
- reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Kapitaslisasi ke Ekstrakomptabel	Rp	33.039.070,00
- penghapusan	Rp	-
- reklasifikasi ke aset lainnya atau Persediaan	Rp	22.500.000,00
Saldo per 31 December 2020	**Rp**	**8.165.963.158,42**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2020	Rp	(5.160.812.444,28)
Nilai Buku Per 31 December 2020	**Rp**	**3.005.150.714,14**

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

a. Pembelian
b. Penerimaan

Mutasi tambah Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) sesuai berita acara aset tetap berasal dari Belanja Modal pada perolehan aset Tahun Anggaran per 31 December 2020 adalah Rp287.100.000 dan Saldo Aset Tahun Anggaran 2019 dan Rp7.934.402.228 adanya mutasi masuk dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Tahun 2020 dan Rp0.

Mutasi Kurang Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) sesuai berita acara aset tetap berasal dari Belanja Modal pada perolehan aset Tahun Anggaran per 31 December 2020 adalah Rp33.039.070 merupakan kapitalisasi ke ekstrakomptabel dan mutasi keluar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp22.500.000 reklasifikasi dari Akun Aset Tetap 1321501 Mebeulair yang dikategorikan persediaan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten ke Akun 9120117 Beban Persediaan Suku Cadang Alat Rumah Tangga sebesar Rp22.500.000 sesuai kebijakan akuntansi.

Gedung dan Bangunan Rp0

C.24 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 December 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

Mutasi Tambah pada Tahun 2019 sebesar Rp0 hasil reklas pencatatan dari belanja modal peralatan dan mesin berupa Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Gedung dan Bangunan namun aset tersebut di limpahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 December 2019	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 December 2020	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2020		-
Nilai Buku Per 31 December 2020	Rp	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp Rp0

C.25 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada tahun 2020 terjadi mutasi tambah sebesar Rp0. Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 December 2019	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 December 2020	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2020		-
Nilai Buku Per 31 December 2020	Rp	-

Aset Tetap Lainnya Rp30.565.000

C.26 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 December 2020 dan 2019 adalah Rp30.565.000 dan Rp26.965.000.

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2020. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo per 31 December 2019	Rp	26.965.000
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	3.600.000
- Koreksi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesn	Rp	-
- Koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 December 2020	Rp	30.565.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2020		-
Nilai Buku Per 31 December 2020	Rp	30.565.000

Mutasi Tambah Rincian Aset Tetap Lainnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa kode rekening Belanja Barang Non Kapitalisasi Tahun Anggaran per 31 December 2020 adalah Rp0 berupa peralatan mesin yang sedianya akan dihapuskan, mutasi masuk sebesar Rp0 berupa matras berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Buku-buku Perpustakaan karena kesalahan pada saat penganggaran sehingga reklas dilakukan sesuai Berita Acara Aset Tetap Lainnya pada Saldo Aset Tahun Anggaran 2019 dan Rp30.565.000.

Mutasi Kurang Rincian Aset Tetap Lainnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran per 31 December 2020 adalah Rp0 berupa peralatan mesin yang sedianya akan dihapuskan, Rp0 .

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp0

C.27 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. .

Saldo per 31 December 2019	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Rehab Berat Ruang Kelas	Rp	-
Mutas kurang:		
- Gedung yang sudah selesai		
Saldo per 31 December 2020	Rp	-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rp5.160.812.444

C.28 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar -Rp5.160.812.444 dan -Rp4.017.250.309.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 December 2020 disajikan pada rincian dibawah ini, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 December 2020

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan 2020	Akm. Penyusutan 2019
1	Peralatan dan Mesin	8.195.402.228	(5.160.812.444)	(4.017.250.309)
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	30.565.000	-	-
Akumulasi Penyusutan		**8.225.967.228**	**(5.160.812.444)**	**(4.017.250.309)**

Aset Tak Berwujud Rp322.785.000

C.29 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud berupa Software Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 adalah Rp143.451.731 dan Rp322.785.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, aset tak berwujud ini merupakan koreksi dari akun belanja barang dan jasa ke akun aset tak berwujud.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 December 2019	Rp	322.785.000
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 December 2020	Rp	322.785.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 December 2020	Rp	(179.333.269)
Nilai Buku Per 31 December 2020	Rp	143.451.731

Rincian Aset Tak Berwujud Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud per 31 December 2020

No.	Uraian	Nilai	
1	Software Aplikasi Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender	Rp	44.165.000
2	Software Aplikasi Peningkatan dan Pengembangan Layanan Masyarakat dalam Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Rp	49.500.000
3	Software Aplikasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana	Rp	44.165.000
4	Penyusutan	Rp	(179.333.269)
Jumlah		**Rp**	**(41.503.269)**

Tidak terdapat mutasi masuk maupun keluar untuk aset tak berwujud ini tahun 2020

Aset Lain-Lain Rp0

C.30 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lain-lain merupakan barang milik daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) serta dalam proses penghapusan dari BMD.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 December 2019	Rp	-
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMD yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMD	Rp	-
Saldo per 31 December 2020	Rp	-
Akumulasi Penyusutan		
Nilai Buku per 31 December 2020	Rp	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat disajikan sebagai berikut:

- Penambahan Aset Lain-lain merupakan aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin yang akan di hapuskan sesuai dengan Berita Acara Penghapusan per 31 December 2020 adalah Rp0.

- Penghapusan Aset Lain-lain berupa aset tetap peralatan dan mesin sesuai dengan Berita Acara Penghapusan per 31 December 2020 adalah Rp0.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya - Rp179.333.269

C.31 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 adalah -Rp179.333.269.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 December 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnyaper 31 December 2020

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	Rp 322.785.000	Rp (179.333.269)	Rp 143.451.731
Aset Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 322.785.000	Rp (179.333.269)	Rp 143.451.731

Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2020

Utang Perhitungan Pihak Ketiga Rp0

C.32 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 December 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp401.673.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 December 2020

No.	Uraian	2020	2019
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp -	Rp 401.673
2		Rp -	Rp -
3		Rp -	Rp -
Total		Rp -	Rp 401.673

Utang Bunga Rp0

C.33 Utang Bunga

Nilai Utang Bunga per 31 December 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan
Adapun rincian Utang Bunga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Bunga per 31 December 2020

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp0

C.34 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 December 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Kekurangan pembayaran gaji berkala 2 orang pegawai.

Adapun rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 December 2020

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.35 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 December 2020

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Utang Beban Rp0

C.36 Utang Beban

Saldo Utang Beban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 sebesar Rp0 dan Rp800.275. Rincian Utang Beban disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang Beban per 31 December 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020	2019
1	Utang Beban	Rp -	Rp 800.275
2		Rp -	Rp -
3		Rp -	Rp -
Total		Rp -	Rp 800.275

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.37 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 December 2020

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Utang Dalam Negeri Rp0

C.38 Utang Dalam Negeri

Saldo Utang Dalam Negeri pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Dalam Negeri sebagai berikut:

Rincian Utang Dalam Negeri per 31 December 2020

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		Rp -	

Utang Jangka Panjang Lainnya Rp0

C.39 Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 December 2020

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1		Rp -	
2		Rp -	
3		Rp -	
Total		**Rp -**	

Ekuitas
Rp3.220.361.415

C.40 Ekuitas

Ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 sebesar Rp3.220.361.415,45 dan Rp4.192.737.499,24.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Ekuitas per 31 December 2020

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Ekuitas Awal	Rp 4.192.737.499,24	Rp 3.776.990.681,69
2	Koreksi Ekuitas	Rp(1.271.230.983,79)	Rp (864.435.214,45)
3	Aset Lancar	Rp 11.754.900,00	Rp 18.855.840,00
4	Belanja Modal	Rp 287.100.000,00	Rp 1.261.326.192,00
Total		**Rp 3.220.361.415,45**	**Rp 4.192.737.499,24**

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional - LO Rp0

D.1 Pendapatan Operasional - LO

Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Operasional - LO Tahun 2020 dan 2019

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	0,00
Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**	**0,00**

Pendapatan Operasional pada Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat pendapat hibah.

Beban Pegawai Rp12.546.150.794

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp12.546.150.794 dan Rp16.178.068.114 sehingga terjadi penurunan sebesar -28,95 persen.

Terjadinya penurunan Beban Pegawai hal ini disebabkan ada kebijakan pemerintah dalam tahun ini dimana pengaruh bencana luar biasa yaitu Covid-19 dimana pegawai bekerja tidak seperti biasa yaitu adanya pembagian tugas Piket dan WFH (Work From Home) sehingga pembayaran Beban Tunjangan Kinerja dilakukan hanya sebesar 50% dan 75%.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun) %
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	Rp 3.236.445.600	Rp 3.161.608.287	2,31
Tunjangan Keluarga - LO	Rp 274.859.932	Rp 270.724.316	1,50
Tunjangan Jabatan - LO	Rp 241.690.000	Rp 247.100.000	-2,24
Tunjangan Umum - LO	Rp 110.880.000	Rp 109.185.000	1,53
Tunjangan Beras - LO	Rp 151.502.640	Rp 152.733.780	-0,81
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	Rp 6.429.944	Rp 4.877.661	24,14
Pembulatan Gaji - LO	Rp 45.445	Rp 50.043	-10,12
Belanja Iuran BPJS Kesehatan - LO	Rp 313.582.123	Rp 88.287.236	71,85
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan - LO	Rp 26.652.500	Rp 25.820.266	3,12
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	Rp 8.154.662.610	Rp 12.087.881.525	-48,23
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	Rp 14.000.000	Rp 29.800.000	-112,86
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - LO	Rp 15.400.000	Rp -	100,00
Jumlah	**Rp 12.546.150.794**	**Rp 16.178.068.114**	**-28,95**

Beban Persediaan Rp975.747.940

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp975.747.940 dan Rp1.243.112.409 mengalami penurunan sebesar -27,40 persen.

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020		Tahun 2019		Naik (Turun) %
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	116.738.440	Rp	190.581.560	-63,26
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	Rp	15.784.500	Rp	17.896.500	-13,38
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Rp	9.900.000	Rp	10.800.000	-9,09
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	-	Rp	20.445.000	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang Peralatan	Rp	2.739.000	Rp	25.627.999	-835,67
Beban Persediaan Suku Cadang Alat Rumah	Rp	22.500.000	Rp	-	100,00
Beban Persediaan Suku Cadang Alat Studio	Rp	-	Rp	18.800.000	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	Rp	-	Rp	121.500.000	0,00
Beban Persediaan Vandel, Plakat, Piala, Medali	Rp	92.100.000	Rp	153.579.850	-66,75
Beban Persediaan Peralatan Dapur	Rp	13.080.000	Rp	9.385.000	28,25
Beban Persediaan Bahan Pakai Habis Peralatan Olah Raga	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Persediaan Percontohan/Peraga/Praktek	Rp	285.600.000	Rp	143.400.000	49,79
Beban Persediaan Cetak	Rp	417.306.000	Rp	531.096.500	-27,27
Jumlah Beban Persediaan	**Rp**	**975.747.940**	**Rp**	**1.243.112.409**	**-27,40**

Beban Jasa Rp5.388.776.887

D.4 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp5.388.776.887 dan Rp9.876.766.369 mengalami penurunan sebesar -83,28 persen.

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020		Tahun 2019		Naik (Turun) %
Beban Jasa Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp	-	Rp	189.390.950	0,00
Beban Jasa Perlengkapan Peserta/Panitia	Rp	-	Rp	259.830.800	0,00
Beban Jasa Bendera dan Umbul-umbul	Rp	20.700.000	Rp	13.750.000	33,57
Beban Jasa telepon/ Faksimili/Internet	Rp	8.493.511	Rp	2.731.619	67,84
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	Rp	61.710.000	Rp	29.040.000	52,94
Beban Jasa TV Cable	Rp	559.750	Rp	6.907.250	-1.133,99
Beban Jasa Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	Rp	20.379.326	Rp	278.397.250	-1.266,08
Beban Jasa Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	3.377.700	Rp	45.770.000	-1.255,06
Beban Jasa Sewa Kamar/Tempat Penginapan	Rp	195.767.600	Rp	65.880.000	66,35
Beban Jasa Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	Rp	196.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Sewa Sarana Mobilitas Darat	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Jasa Sewa Sarana Mobilitas Air	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Jasa Sewa Electrik Generating Set	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Jasa Sewa Alat Bantu	Rp	-	Rp	51.440.000	0,00
Beban Jasa Sewa Meja Kursi	Rp	17.340.000	Rp	49.200.000	-183,74
Beban Jasa Sewa Tenda	Rp	30.000.000	Rp	60.610.000	-102,03
Beban Jasa Sewa Sound system dan Air	Rp	47.400.000	Rp	40.000.000	15,61
Beban Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan	Rp	23.507.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Sewa Alat Musik	Rp	-	Rp	2.840.000	0,00
Beban Jasa Sewa Tanaman Hias	Rp	-	Rp	60.208.000	0,00
Beban Jasa Makanan dan Minuman Rapat	Rp	85.152.000	Rp	1.408.476.000	-1.554,07
Beban Jasa Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp	202.670.000	Rp	65.650.000	67,61
Beban Jasa Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp	36.800.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Pakaian Dinas Batik	Rp	27.350.000	Rp	6.100.000	77,70
Beban Jasa Pakaian kerja lapangan	Rp	29.150.000	Rp	26.300.000	9,78
Beban Jasa Pakaian Batik Tradisional	Rp	29.400.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Pakaian Olahraga	Rp	25.200.000	Rp	44.700.000	-77,38
Beban Jasa Pakaian Bercorak Kesenian	Rp	-	Rp	347.999.500	0,00
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan	Rp	136.475.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Konsultasi Manajemen	Rp	52.200.000	Rp	95.000.000	-81,99
Beban Jasa Konsultasi Software Aplikasi	Rp	-	Rp	42.500.000	0,00
Beban Jasa Konsultasi Survey	Rp	83.000.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Hadiah Prestasi Bidang	Rp	62.000.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Hadiah Prestasi Bidang	Rp	-	Rp	2.241.420.000	0,00
Beban Jasa Bantuan Sosial Berupa Barang	Rp	-	Rp	3.000.000	0,00
Beban Jasa Uang Saku	Rp	528.750.000	Rp	1.500.000	99,72
Beban Jasa Uang Makan Tambahan (Extra	Rp	16.800.000	Rp	9.500.000	43,45
Beban Jasa Kesenian Tradisional	Rp	-	Rp	2.977.150.000	0,00
Beban Jasa Kesenian Modern	Rp	-	Rp	285.450.000	0,00
Beban Jasa Narasumber/Instruktur	Rp	2.103.650.000	Rp	5.000.000	99,76
Beban Jasa Tenaga Ahli	Rp	319.950.000	Rp	221.650.000	30,72
Beban Jasa Pendamping	Rp	5.000.000	Rp	108.000.000	-2.060,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Lapangan	Rp	306.150.000	Rp	11.760.000	96,16
Beban Jasa Operator/Administrasi/Teknis	Rp	507.000.000	Rp	69.025.000	86,39
Beban Jasa Pembayaran kepada Pihak ketiga	Rp	-	Rp	30.185.000	0,00
Beban Jasa Internet	Rp	2.100.000	Rp	348.355.000	-16.488,33
Beban Jasa Dokumentasi	Rp	62.604.000	Rp	372.050.000	-494,29
Beban Jasa Dekorasi	Rp	23.400.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Promosi dan Publikasi	Rp	314.545.000	Rp	-	100,00
Beban Jasa Honorarium Pegawai	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah	**Rp**	**5.388.776.887**	**Rp**	**9.876.766.369**	**-83,28**

Beban Pemeliharaan Rp312.248.267

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp312.248.267 dan Rp358.235.902 mengalami penurunan sebesar -83,28 persen.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020		Tahun 2019		Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Jasa Service	Rp	34.547.526	Rp	237.535.752	-587,56
Beban Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang	Rp	62.235.846	Rp	43.763.550	29,68
Beban Pemeliharaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp	153.294.703	Rp	36.893.200	75,93
Beban Pemeliharaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	Rp	36.008.000	Rp	-	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp	16.920.000	Rp	7.158.400	57,69
Beban Pemeliharaan Komputer	Rp	9.242.192	Rp	29.185.000	-215,78
Beban Pemeliharaan Barang Non Kapitalisasi Peralatan Kantor	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Pemeliharaan Barang Non Kapitalisasi Konstruksi/Bangunan	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Pemeliharaan Barang Non Kapitalisasi	Rp	-	Rp	3.700.000	0,00
Jumlah	**Rp**	**312.248.267**	**Rp**	**358.235.902**	**-14,73**

Beban Perjalanan Dinas Rp464.365.538

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp464.365.538 dan Rp1.478.874.959 mengalami penurunan sebesar -218,47 persen.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020		Tahun 2019		Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	269.647.130	Rp	586.771.675	-117,61
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	183.618.408	Rp	871.880.284	-374,83
Beban Perjalanan Dinas Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	Rp	-	Rp	13.672.000	0,00

Beban Perjalanan Dinas Pengiriman Bimbingan Teknis	Rp	11.100.000	Rp	6.551.000	40,98
Jumlah	**Rp**	**464.365.538**	**Rp**	**1.478.874.959**	**-218,47**

Beban Bunga Rp0

D.7 Beban Bunga

Beban Bunga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bunga Tahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020		Tahun 2019		Naik (Turun) %
	Rp	-	Rp	-	0,00
	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**0,00**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.10 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020		Tahun 2019		Naik (Turun) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**0,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.231.077.092

D.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.231.077.092 dan Rp1.032.428.617 mengalami kenaikan sebesar 16,14 persen.

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019 dapat dirinci sebagai berikut

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun 2020		Tahun 2019		Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	1.143.562.135	Rp	977.939.264	14,48
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah Penyusutan	**Rp**	**1.143.562.135**	**Rp**	**977.939.264**	**14,48**
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp	87.514.957	Rp	54.489.353	37,74
Beban Penyusutan aset lain-lain	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah Amortisasi	**Rp**	**87.514.957**	**Rp**	**54.489.353**	**37,74**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**Rp**	**1.231.077.092**	**Rp**	**1.032.428.617**	**16,14**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.13 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020		Tahun 2019		Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	Rp	-	Rp	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	Rp	-	Rp	-	0,00
Jumlah	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**0,00**

Beban Lain-lain Rp0

D.16 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Penyisihan Piutang atas Beban Lain-lain untuk Tahun 2020 dan 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun) %
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	0,00
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	0,00
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah Penyusutan	**Rp -**	**Rp -**	**0,00**

Kegaiatan Non Operasional Rp0

D.17 Kegaiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dna fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegaiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka	Rp -	Rp -	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegaitan Non Operasional	**Rp -**	**Rp -**	**0,00**

Pos Luar Biasa Rp0

D.18 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -	0,00
Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**	**0,00**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp4.192.737.499

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.192.737.499 dan Rp3.776.990.682 mengalami kenaikan sebesar 11,01 persen.

Surplus (Defisit) LO -Rp20.918.366.518

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) periode yang berakhir pada 31 December 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar -Rp20.918.366.518 dan -Rp30.167.486.370 mengalami penurunan sebesar -30,66 persen.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.5 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	Rp -
Suku Cadang	Rp -
Barang Persediaan Lainnya	Rp -
Jumlah	**Rp -**

Koreksi Aset Tetap Rp0

E.9 Koreksi Aset Tetap

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2020 sebesar Rp0 .

Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin bersumber dari Mutasi Aset Tetap Masuk sebesar Rp0 dan Mutasi Aset Tetap Keluar Reklasifikasi sebesar Rp0 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) ke Persediaan.

Rincian Koreksi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Mutasi Aset Tetap Masuk	Rp -
Mutasi Aset Tetap Keluar	Rp -
Jumlah	**Rp -**

Koreksi Aset Lainnya Rp0

E.11 Koreksi Aset Lainnya

Koreksi Atas Aset Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan Aset Lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Aset Lainnya untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	Rp -
Beban Jasa	Rp -
Jumlah	**Rp -**

Ekuitas Akhir Rp3.220.361.415

E.13 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) pada tanggal 31 December 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.220.361.415 dan Rp4.192.737.499 mengalami kenaikan sebesar -23,19 persen.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Kejadian penting pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) setelah tanggal Neraca tidak ada permasalahan yang mendasar pada saat penyusunan laporan akhir tahun ini.

F.2 INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

Untuk informasi tambahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) dapat digambarkan perbandingan perolehan anggaran maupun realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 sebagai informasi bahwa OPD ini baru terbentuk tahun 2017.

b. Perlu kami informasikan bahwa dalam menatausahakan tata kelola keuangan adanya penurunan dalam hal realisasi anggaran per 31 December 2020, hal ini diakibatkan kondisi pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.

Sebagai dasar dari keterkaitannya dengan hal realisasi anggara kami lampirkan Surat Keputusan Gubernur nomor; 443/Kep.114-Huk/2020 Tentang Penetapan KLB Covid-19.

C. Perlu kami informasikan bahwa dalam menatausahakan tata kelola keuangan terhadap rekapitulasi register per 31 December 2020.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) melalui pencatatan yang dilakukan Satuan PPK dan Satuan Bendahara Pengeluaran telah menerbitkan berbagai Berkas dokumen SPP dan SPM/SP2D sebesar Rp23.807.358.490 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai SP2D
- SPP/SPM/SP2D UP sebesar	500.000.000
- SPP/SPM/SP2D TU sebesar	3.359.088.056
- SPP/SPM/SP2D GU sebesar	2.753.652.242
- SPP/SPM/SP2D LS sebesar	14.114.729.545
- SPP/SPM/SP2D Nihil sebesar	3.079.888.647
Total Nilai SP2D	**23.807.358.490**
Jumlah Nilai Belanja SP2D	**19.948.270.434**
Pengembalian Belanja	**529.640.909**
Total Nilai Belanja Sesuai LRA	**19.418.629.525**
- SPP/SPM/SP2D UP sebesar	500.000.000
- SPP/SPM/SP2D TU sebesar	3.359.088.056
Jumlah SP2D UP + TU	**3.859.088.056**
- SPP/SPM/SP2D Nihil sebesar	3.079.888.647
SP2D UP + TU - NIHIL	**779.199.409**
STS TU	**529.640.909**
STS UP	**249.558.500**
Jumlah STS	**779.199.409**
NILAI KAS JUMLAH SP2D UP + TU - NIHIL - STS	**-**

Dapat kami jelaskan Total Realisasi Belanja baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung di rinci pada tabel berikut ini ;

LAPORAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.312.400.000,00	3.236.445.600,00	97,71
2	Belanja Tunjangan Keluarga	295.100.000,00	274.859.932,00	93,14
3	Belanja Tunjangan Jabatan	251.617.173,00	241.690.000,00	96,05
4	Belanja Tunjangan Umum	120.509.633,00	110.880.000,00	92,01
5	Belanja Tunjangan Beras	169.462.800,00	151.502.640,00	89,40
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	6.429.944,00	45,93
7	Belanja Pembulatan Gaji	100.550,00	45.445,00	45,20
8	Belanja Iuran BPJS Kesehatan	391.800.000,00	313.582.123,00	80,04
9	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	31.919.844,00	27.054.173,00	84,76
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	8.274.090.000,00	8.154.662.610,00	98,56
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	19.200.000,00	14.000.000,00	0,00
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	172.800.000,00	15.400.000,00	8,91
	Jumlah	**13.053.000.000,00**	**12.546.552.467,00**	**96,12**

LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Program Tata Kelola Pemerintahan			
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	36.000.000	32.747.000	90,96
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	250.562.000	232.981.000	92,98
3	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	0	0	#DIV/0!
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0	0	#DIV/0!
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0	0	#DIV/0!
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	22.400.000	14.400.000	64,29
7	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0	0	#DIV/0!
8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	5.400.000	5.360.000	99,26
9	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	2.045.604.000	1.908.052.785	93,28
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera			
10	Perencanaan Responsif Gender	379.424.600	284.186.592	74,90
11	Peningkatan kualitas hidup perempuan	998.897.000	821.066.000	82,20
12	Peningkatan kualitas keluarga	1.129.971.400	916.451.400	81,10
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak			
13	Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak	522.069.000	432.419.000	82,83
14	Perlindungan khusus terhadap anak	422.520.000	397.040.000	93,97
15	Perlindungan Hak Perempuan	597.300.000	561.710.000	94,04
	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
16	Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi kependudukan	0	0	#DIV/0!
17	Pembinaan administrasi sebagai data dan informasi pencatatan sipil	0	0	#DIV/0!
18	Pembinaan dan peningkatan layanan data dan informasi kependudukan dan catatan	0	0	#DIV/0!
19	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)	78.000.000	41.896.400	53,71
20	Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)	77.577.000	37.508.725	48,35
21	Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)	80.000.000	53.964.000	67,46
22	Peningkatan Penyelenggaraan KTP-El dan KIA	125.000.000	92.749.760	
23	Peningkatan Administrasi Catatan Sipil	96.611.614	85.419.000	88,41
24	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	225.208.986	167.421.500	74,34
	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana			#DIV/0!
25	Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk	497.325.000	411.178.500	82,68
26	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana	0	0	#DIV/0!
27	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga Berencana	0	0	#DIV/0!
28	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan (AKIE) Keluarga Berencana (KB)	481.158.000	347.491.305	72,22
29	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	515.625.000	270.575.000	52,48
	Jumlah	**8.586.653.600**	**7.114.617.967**	**82,86**

c. Penertiban Pegawai antara lain :

Dapat diinformasikan bahwa pegawai sebanyak 64 (enam puluh empat) orang ASN dari mutasi masuk 0 (nol) pegawai dan ada 1 (satu) ASN yang pensiun/purna masa tugas sehingga ASN Tahun 2020 sebanyak 63 (enam puluh tiga) dan Tenaga Honorer/P3K sebanyak 29, Dinas ini baru dibentuk Tahun 2017. Data ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) sampai dengan akhir Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

d. Organisasi

Salah satu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten berdasarkan :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.351-Huk/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :

   1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/atasan langsung bendahara, dan berwenang menandatangi SPM dan mengesahkan SPJ adalah :

      Nama : **Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si**
      NIP : 19681012 198803 2 003
      Jabatan : Kepala DP3AKKB Provinsi Banten

   2) Bendahara Pengeluaran
      Nama : **Siti Fatimah, Sos**
      NIP : 19761107 200112 2 003
      Jabatan : Bendahara Pengeluaran DP3AKKB Provinsi Banten

2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 034.05/Kep.355-Huk/2019 tentang Penetapan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Panatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu/Pengurus Barang Pembantu Unit Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019 antara lain sebagai berikut:

   1) Pejabat Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang DP3AKKB
      Nama : **Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si**
      NIP : 19681012 198803 2 003

2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang DP3AKKB
   Nama : **Siti Fatimah, Sos**
   NIP : 19761107 200112 2 003

3) Pengurus Barang Pengguna DP3AKKB
   Nama : **Yuliyanti, S.Ag.M.Si**
   NIP : 19760702 200112 2 001

4. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Nomor 902/006-DP3AKKB/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :

   1) Nama : **Nurhayati, SE**
      NIP : 19761019 200701 2 008

   2] Nama : **Yogi Sudirman**
      NIP : 19790714 201409 1 001

5. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Nomor 902/426-DP3AKKB/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :

   1] Nama : **Agus Tejo Harmonotha, SH**
      NIP : 19710105 200701 1 013

   2] Nama : **Reyza Mona Angrayni, S.STP**
      NIP : 19921006 201406 2 011

6. Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 045.05/Kep.346-Huk/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Penetapan Pengelola Arsip pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :

   1] Nama : **Panca Mega Putra**
      NIP : 19670601 201401 1 001

   1] Nama : **Dian Utami Indriany**
      NIP : 19810924 201410 2 002

7. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Nomor 900/014-DP3AKKB/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pembantu Pengurus Barang Milik Pemerintah Provinsi Banten di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :

1]	Nama	:	**Rini Mulyani, SE**
	NIP	:	19800924 200112 2 004

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)

Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang
Serang

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 03 January 2020

Kepala,

Dra. Hj. SITTI MA'ANI NINA, M.Si
NIP. 19681012 198803 2 003